



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : UND/1019/KSP.00/70-73/08/2026 07 Agustus 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Diseminasi Pedoman Pelaporan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Risk Based Surveillance (RBS) Tahun 2026

**Yth. Kepala Daerah/Plt. Kepala Daerah
(Terlampir)**

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b serta Pasal 8 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang menetapkan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi (TPK).

Sehubungan dengan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan TPK dan dalam rangka pelaksanaan *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP)-RBS* Tahun 2026, Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi akan melaksanakan **Diseminasi Pedoman Pelaporan MCSP-RBS Tahun 2026** secara daring pada:

1. Area Perencanaan dan Penganggaran APBD

Hari/Tanggal : Selasa/ 11 Agustus 2026
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIT
Agenda : Diseminasi Pedoman Pelaporan *MCSP-RBS* Tahun 2026
Area Perencanaan dan Penganggaran APBD
Tempat : Ruang *Zoom Meeting* melalui akses
<https://kpk-go-id.zoom.us/j/83003701885>
Meeting ID: 830 0370 1885
Passcode: k9LQvz4Y

2. Area Pengadaan Barang dan Jasa

Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Agustus 2026
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIT
Agenda : Diseminasi Pedoman Pelaporan *MCSP-RBS* Tahun 2026
Area Pengadaan Barang dan Jasa
Tempat : Ruang *Zoom Meeting* melalui akses
<https://kpk-go-id.zoom.us/jc/87472549128>
Meeting ID: 874 7254 9128
Passcode: i87S8eNd

3. Area Pelayanan Publik

Hari/Tanggal : Kamis/ 13 Agustus 2026
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIT
Agenda : Diseminasi Pedoman Pelaporan *MCSP-RBS* Tahun 2026
Area Pelayanan Publik
Tempat : Ruang *Zoom Meeting* melalui akses
<https://kpk-go-id.zoom.us/j/86577480507>
Meeting ID: 865 7748 0507
Passcode: L8XM97Xi

4. Area Barang Milik Daerah (BMD)

Hari/Tanggal : Rabu/ 19 Agustus 2026
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIT
Agenda : Diseminasi Pedoman Pelaporan *MCSP-RBS* Tahun 2026
Area Barang Milik Daerah (BMD)
Tempat : Ruang *Zoom Meeting* melalui akses
<https://kpk-go-id.zoom.us/j/87231129401>
Meeting ID: 872 3112 9401
Passcode: Dg1zT8q0

5. Area Optimalisasi Pajak Daerah

Hari/Tanggal : Kamis/ 20 Agustus 2026
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIT
Agenda : Diseminasi Pedoman Pelaporan *MCSP-RBS* Tahun 2026
Area Optimalisasi Pajak Daerah
Tempat : Ruang *Zoom Meeting* melalui akses
<https://kpk-go-id.zoom.us/j/81695583432?pwd=W1c0YjUPBDt0ZdhxMlhVhrUqL0t434.1>
Meeting ID: 816 9558 3432
Passcode: dNxYdy7E

6. Area Penguatan APIP

Hari/Tanggal : Senin/24 Agustus 2026
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIT
Agenda : Diseminasi Pedoman Pelaporan *MCSP-RBS* Tahun 2026
Area Penguatan APIP
Tempat : Ruang *Zoom Meeting* melalui akses
<https://kpk-go-id.zoom.us/j/84223946444?pwd=ekrAUwPnUfnCEg1AcEc2WkCH8NVnpL.1>
Meeting ID: 842 2394 6444
Passcode: dzX4v5ke

7. Area Manajemen ASN

Hari/Tanggal : Rabu/26 Agustus 2026
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIT
Agenda : Diseminasi Pedoman Pelaporan *MCSP-RBS* Tahun 2026
Area Manajemen ASN
Tempat : Ruang *Zoom Meeting* melalui akses
<https://kpk-go-id.zoom.us/j/88531326108?pwd=VgtbiDeNIPmaWaGhU8ZSTirUshicbM.1>
Meeting ID: 885 3132 6108
Passcode: 67xsH5SA

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan menugaskan pejabat yang membidangi area terkait untuk mengikuti Rapat Koordinasi dimaksud secara daring.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Risk Based Surveillance (RBS)* Tahun 2026, pemerintah daerah dapat menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang memerlukan penjelasan terkait pedoman MCSP-RBS Tahun 2026 melalui tautan berikut: <https://bit.ly/DaftarPertanyaanMCSP2026>. Pertanyaan yang disampaikan dan memiliki relevansi umum akan menjadi bahan pembahasan pada saat pelaksanaan kegiatan diseminasi.

Untuk Informasi dan koordinasi lebih lanjut pemerintah daerah dapat menghubungi PIC Wilayah masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Ely Kusumastuti

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Plt. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lampiran 1

Nomor : UND/1019/KSP.00/70-
73/08/2026

Tanggal : 07 Agustus 2026

Daftar Kepala Daerah/ Plt. Kepala Daerah:

PROVINSI MALUKU UTARA

1. Gubernur Maluku Utara
2. Bupati Halmahera Barat
3. Bupati Halmahera Tengah
4. Bupati Halmahera Timur
5. Bupati Halmahera Selatan
6. Bupati Halmahera Utara
7. Bupati Kepulauan Sula
8. Bupati Pulau Morotai
9. Bupati Pulau Taliabu
10. Wali Kota Ternate
11. Wali Kota Tidore Kepulauan

PROVINSI MALUKU

1. Gubernur Maluku
2. Bupati Maluku Tengah
3. Bupati Maluku Tenggara
4. Bupati Kepulauan Tanimbar
5. Bupati Buru
6. Bupati Seram Bagian Timur
7. Bupati Seram Bagian Barat
8. Bupati Kepulauan Aru
9. Bupati Maluku Barat Daya
10. Bupati Buru Selatan
11. Wali Kota Ambon
12. Wali Kota Tual

PROVINSI PAPUA

1. Gubernur Papua
2. Bupati Jayapura
3. Bupati Keerom
4. Bupati Sarmi
5. Bupati Mamberamo Raya
6. Bupati Biak Numfor
7. Bupati Kepulauan Yapen
8. Bupati Supiori

9. Bupati Waropen
10. Wali Kota Jayapura

PROVINSI PAPUA BARAT

1. Gubernur Papua Barat
2. Bupati Manokwari
3. Bupati Fak Fak
4. Bupati Kaimana
5. Bupati Manokwari Selatan
6. Bupati Pegunungan Arfak
7. Bupati Teluk Bintuni
8. Bupati Teluk Wondama

PROVINSI PAPUA SELATAN

1. Gubernur Papua Selatan
2. Bupati Merauke
3. Bupati Boven Digoel
4. Bupati Mappi
5. Bupati Asmat

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

1. Gubernur Papua Pegunungan
2. Bupati Jayawijaya
3. Bupati Pegunungan Bintang
4. Bupati Mamberamo Tengah
5. Bupati Lanny Jaya
6. Bupati Yahukimo
7. Bupati Tolikara
8. Bupati Yalimo
9. Bupati Nduga

PROVINSI PAPUA TENGAH

1. Gubernur Papua Tengah
2. Bupati Nabire
3. Bupati Paniai
4. Bupati Mimika
5. Bupati Puncak
6. Bupati Puncak Jaya
7. Bupati Deiyai
8. Bupati Dogiyai
9. Bupati Intan Jaya

PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA

1. Gubernur Papua Barat Daya
2. Wali Kota Sorong
3. Bupati Sorong
4. Bupati Sorong Selatan
5. Bupati Raja Ampat
6. Bupati Tambrau
7. Bupati Maybrat

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Ely Kusumastuti